

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriyati Rafli *et.al*, 2006, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik Di Indonesia*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2014, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan IV, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, PT. Erlangga.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Cetakan Ketujuh*, Balai Pustaka, Jakarta.
- HS, Salim H, Nurbaini, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun SF, Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan)* Cetakan III, Nusa Media, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah* Cetakan I, UII Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara* Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.B Suharjo B. Cahyono, 2013, *Menjadi Pasien Cerdas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Juniarso, Ridwan, Achmad, Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* Cetakan I, PT. Nuansa, Bandung.

Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep, Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Phillipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Redaksi BPJS Kesehatan, 2014, *Panduan Praktis Program Rujuk Balik*, BPJS Kesehatan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* Edisi V, Liberty Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, UAJ Press, Yogyakarta.

Tesis dan Jurnal

Cecep Triwibowo, 2011, *Tinjauan Yuridis Perizinan Pendirian dan Operasional Rumah Sakit Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, *Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu*, *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 2, 2012, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 290 s.d 301

Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* Volume 9, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 53 s.d 59

Muhammad Mulyohadi dkk, 2009, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien dalam Andi Yok Siswosaputro dan Dahlia Herawati*, *Telaah Pustaka: Hubungan Dokter Pasien Sesuai Harapan Konsil Kedokteran Indonesia*, *Majalah Kedokteran Gigi* Volume 19, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, 2012, Yogyakarta, hlm.172-181

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan dan Pengobat Tradisional (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 5).

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 7).

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perizinan Usaha Di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 13).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Laman Web

dr. Supriyantoro, Sp.P.MARS, *Mutu Pelayanan Kesehatan, Kredensialing Dalam JKN*, [<https://www.mutupelayanankesehatan.net/sample-levels/19-headline/955-kredensialing-dalam-jkn>], diakses tanggal 05 Februari 2018.

Sunendar, Dadang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, sebagaimana dimuat di laman kbbi.kemdikbud.go.id/entri/, diakses tanggal 20 September 2017.

Wawancara

Hamdiyah, Siti, 2018, Upaya IDI Kota Tarakan dan PDGI Cabang Tarakan dalam Mempersiapkan Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, *Wawancara*, Tarakan, 12 Januari.

Prastyanto, Sigit, 2018, Upaya IDI Kota Tarakan dan PDGI Cabang Tarakan dalam Mempersiapkan Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, *Wawancara*, Tarakan, 16 Januari.

Sumiati, 2018, Upaya Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Tarakan, *Wawancara*, Tarakan, 15 Januari